

**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN USAHA BUMN**

NOTA DINAS

Nomor: AK.03.01/11/D.I.M.EKON.1/1/2026

Yth. : Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama
Dari : Sekretaris Deputy
Hal : Laporan Kinerja Sekretariat Deputy I Triwulan IV T.A 2025
Tanggal : 14 Januari 2026
Lampiran : 1 (satu) berkas

Menindaklanjuti Nota Dinas Saudara Nomor: AK.03.01/12/SET.M.EKON.1/01/2026 tanggal 9 Januari 2025, bersama ini kami sampaikan Laporan Kinerja Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Triwulan IV T.A 2025 untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya. Adapun dokumen pendukung Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 dapat diakses pada tautan berikut: https://bit.ly/BuktidukungSesdep1_TW4_2025.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Deputy



Muhammad Saifulloh

Tembusan Yth.:
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN.

Laporan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025
Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN

A. Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025

Hasil pengukuran kinerja Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Triwulan IV Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025	Target Triwulan IV 2025	Realisasi Triwulan IV	Capaian (%)
I	<i>Sasaran Kegiatan 1. Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang Baik</i>					
1.1	Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN	%	100	100	100	100
1.2	Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN	%	100	100	100	100
1.3	Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN	%	100	100	100	100
1.4	Tingkat Ketaatan Pelaporan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN	%	100	100	100	100
1.5	Persentase Penyelesaian Isu Strategis yang Diberikan oleh Deputi	%	100	100	100	100
1.6	Persentase Pembangunan Zona Integritas Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN	%	70	70	105,20	120
1.7	Indeks Kepuasan Layanan Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN	Indeks	3 dari 4	3 dari 4	4	120

Kinerja Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

1

Sasaran Kegiatan 1. Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang Baik

Pencapaian Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang Baik ditunjukkan oleh pencapaian empat indikator kinerja yaitu:

1. Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN
2. Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN
3. Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN
4. Tingkat Ketaatan Pelaporan Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN
5. Persentase Penyelesaian Isu Strategis yang Diberikan oleh Deputy
6. Persentase Pembangunan Zona Integritas Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN
7. Indeks Kepuasan Layanan Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1. Tingkat

**Implementasi
Reformasi
Birokrasi Deputy
Bidang Koordinasi
Pengelolaan dan
Pengembangan
Usaha BUMN**

Latar Belakang

Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN merupakan ukuran yang menggambarkan sejauh mana unit kerja mampu mengimplementasikan Reformasi Birokrasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pada praktiknya, implementasi Reformasi Birokrasi diukur dengan pemenuhan bukti dukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kedeputian. Adapun dokumen data dukung yang dinilai mampu menggambarkan implementasi Reformasi Birokrasi yang baik harus memenuhi 2 (dua) aspek utama, yaitu (1) ketepatan waktu penyampaian laporan berdasarkan periode laporan tertentu (Triwulan I, II, III dan IV) dan tanggal penyampaian dokumen tersebut kepada unit pengampu (tertera pada ND yang diedarkan unit pengampu), (2) substansi laporan telah sesuai dengan standar atau format yang ditentukan oleh unit pengampu.

Ruang lingkup Implementasi Reformasi Birokrasi diukur dari kegiatan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik pada Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang mendukung pencapaian indikator RB Kementerian sebagaimana diatur pada Peraturan Menpan-RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi. Adapun waktu penyampaian dokumen/laporan disesuaikan dengan Nota Dinas yang dikeluarkan oleh Kepala Biro Hukum dan Organisasi.

Penilaian kegiatan Reformasi Birokrasi diukur dari pemenuhan bukti dukung sebagai berikut:

No	Indikator	Bukti Dukung	Jumlah Bukti Dukung	Standar Ketepatan Substansi	Standar Ketepatan Waktu
1	Rencana Aksi Pembangunan RB General	Pemetaan Rencana Aksi RB Tematik 2025	1 Dokumen	Mengacu ND Biro MKKS	Triwulan III
2	Tingkat Capaian Kebijakan Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai	Dokumen Penyusunan dan Penetapan Tim Kerja	21 Dokumen	Dokumen tertandatangani	Triwulan III
3	Tingkat Maturitas SPIP	1. Dokumen Kertas Kerja Penilaian Mandiri SPIP 2. Dokumen matriks Manajemen Risiko	8 Dokumen	Dokumen tertandatangani	1. SPIP : TW II 2. MR : TW III
4	Nilai SAKIP	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Inspektorat	1 Dokumen	Mengacu ND Inspektur	Mengacu ND Inspektur
5	Indeks Perencanaan Pembangunan	1. Revisi Renja 2025 2. Usulan Renja 2026 3. Usulan Rancangan Renstra Kemenko Perekonomian 4. TOR RAB setelah revisi Renja 2025	4 Dokumen	Mengacu ND Biro MKKS	1. Revisi Renja 2025: TW II 2. Renja 2026: TW I 3. Usulan Renstra: TW II 4. TOR-RAB Revisi: TW III
6	Tingkat Digitalisasi Arsip	Rekap Dokumen dalam Srikandi	12 Dokumen	1. Dokumen terdisposisi 2. Dokumen tertandatangani	Tanggal 5 bulan berikutnya
7	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Rencana Penarikan Dana (RPD)	16 Dokumen	1. Uraian program/kegiatan/RO/Komponen 2. Pagu 3. Realisasi 4. Sisa anggaran	Tanggal 5 bulan berikutnya
8	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat melalui Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!)	Dokumen Hasil Tindaklanjuti Laporan Hasil pemantauan SP4N-LAPOR!	2 Dokumen	Mengacu ND Inspektorat	Triwulan II dan IV

9	Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)	Dokumen Bukti Dukung IKK	1 Dokumen	Bukti dukung lengkap sesuai kriteria	Triwulan III
10	Indeks Tata Kelola Kelola Pengadaan	Dokumen pengisian dan pencatatan SIRUP	2 Dokumen	SIRUP terisi lengkap	Triwulan I dan IV
11	Indeks Sistem Merit	1. Dokumen pemanfaatan Aplikasi E-Kinerja BKN 2. Dokumen usulan formasi ASN	2 Dokumen	Mengacu ND dari Biro Umum	1. E-Kinerja: TW I 2. Usulan Formasi: TW IV
12	Capaian IKU	Laporan Kinerja Triwulanan	4 Dokumen	1. Ringkasan Kinerja Triwulanan 2. Narasi setiap IKU a. Latar belakang b. Hasil pengukuran kinerja c. Pelaksanaan Rencana Aksi triwulanan, Capaian Kegiatan dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya d. Kendala dan upaya perbaikan pencapaian target	Mengacu pada ND Kepala Biro MKKS
13	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Capaian Akuntabilitas Keuangan)	Dokumen Pendukung pemeriksaan BPK	1 Dokumen	Mengacu ND dari Inspektorat	Triwulan II Tahun berikutnya
14	Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Capaian Akuntabilitas Keuangan)	Dokumen hasil rekomendasi BPK	1 Dokumen	Mengacu ND dari Inspektorat	Triwulan II dan IV
15	Survei Penilaian Integritas (SPI)	Dokumen Usulan data responden Internal dan Eksternal	1 Dokumen	Mengacu ND dari Inspektorat	Triwulan II
16	Indeks BerAKHLAK	Dokumen Usulan Agen Perubahan	1 Dokumen	Mengacu ND dari Biro Hukum dan Organisasi	Triwulan II
Total			78 Dokumen		

Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN dihitung berdasarkan seberapa banyak bukti

dukung RB General dan RB Tematik yang dihasilkan sesuai standar di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN dibandingkan dengan jumlah keseluruhan bukti dukung yang telah dihasilkan. Berikut merupakan formulasi dalam menentukan Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN:

$$\text{Tingkat implementasi RB} = \frac{\text{Total Bukti Dukung RB yang dihasilkan sesuai standar}}{\text{Total Bukti Dukung RB yang dihasilkan}} \times 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2025 sebesar 100%, dengan target pada Triwulan IV Tahun 2025 sebesar 100%. Penetapan target tahun 2025 mempertimbangkan dokumen *output* (bukti dukung) yang dihasilkan setiap indikator yang dalam lingkup koordinasi Sekretariat Deputi yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Tahun 2025. Target tersebut ditetapkan sebagai komitmen Unit Kerja untuk mendukung pencapaian implementasi RB pada tingkat Kementerian. Unit kerja berkomitmen untuk memenuhi seluruh data dukung implementasi RB yang memenuhi standar substansi dan standar ketepatan waktu.

Hingga Triwulan IV Tahun 2025, realisasi tingkat implementasi RB Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN mencapai 100%, yang dihitung berdasarkan total bukti dukung RB yang dihasilkan sesuai standar sebanyak 78 dokumen, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Triwulan IV	Realisasi Triwulan IV	%Kinerja
IKU-1.1 Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN	%	100	100	100

Dokumen bukti dukung Reformasi Birokrasi yang telah dihasilkan sesuai standar sampai dengan Triwulan IV antara lain:

No	Indikator	Bukti Dukung	Target	Realisasi
1	Rencana Aksi Pembangunan RB General	Pemetaan Rencana Aksi RB Tematik 2025	1 Dokumen	1 Dokumen
2	Tingkat Capaian Kebijakan Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai	Dokumen Penyusunan dan Penetapan Tim Kerja	21 Dokumen	21 Dokumen
3	Tingkat Maturitas SPIP	1. Dokumen Kertas Kerja	8 Dokumen	8 Dokumen

		Penilaian Mandiri SPIP 2. Dokumen matriks Manajemen Risiko		
4	Nilai SAKIP	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Inspektorat	1 Dokumen	1 Dokumen
5	Indeks Perencanaan Pembangunan	1. Revisi Renja 2025 2. Usulan Renja 2026 3. Usulan Rancangan Renstra Kemenko Perekonomian 4. TOR RAB setelah revisi Renja 2025	4 Dokumen	4 Dokumen
6	Tingkat Digitalisasi Arsip	Rekap Dokumen dalam Srikandi	12 Dokumen	12 Dokumen
7	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	1. Laporan Realisasi Laporan Realisasi Anggaran 2. Rencana Penarikan Dana (RPD)	16 Dokumen	16 Dokumen
8	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat melalui Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!)	Dokumen Hasil Tindaklanjuti Laporan Hasil Pemantauan SP4N-LAPOR!	2 Dokumen	2 Dokumen
9	Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)	Dokumen Bukti Dukung IKK	1 Dokumen	1 Dokumen
10	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Dokumen pengisian dan pencatatan SIRUP	2 Dokumen	2 Dokumen
11	Indeks Sistem Merit	1. Dokumen pemanfaatan Aplikasi E-Kinerja BKN 2. Dokumen Usulan Formasi ASN	2 Dokumen	2 Dokumen
12	Capaian IKU	Laporan Kinerja Triwulanan	4 Dokumen	4 Dokumen
13	Opini Badan Pemeriksa	Dokumen Pendukung	1 Dokumen	1 Dokumen

	Keuangan (BPK) (Capaian Akuntabilitas Keuangan)	Pemeriksaan BPK		
14	Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Capaian Akuntabilitas Keuangan)	Dokumen hasil rekomendasi BPK	1 Dokumen	1 Dokumen
15	Survei Penilaian Integritas (SPI)	Dokumen Usulan data responden Internal dan Eksternal	1 Dokumen	1 Dokumen
16	Indeks BerAKHLAK	Dokumen Usulan Agen Perubahan	1 Dokumen	1 Dokumen
Total			78 Dokumen	78 Dokumen

Dalam rangka Implementasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang baik, sampai dengan Triwulan IV telah dilakukan berbagai upaya pemenuhan standar dan ketepatan waktu serta melaksanakan beberapa rencana aksi sehingga persentase pemenuhan target Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN hingga akhir tahun 2025 dapat terpenuhi 100%.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW IV, Capaian Kegiatan dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 sebagai berikut:

1.1. Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN			
No	Rencana Aksi	Status	Keterangan
Triwulan I			
1	Penyusunan dan Penetapan Perjanjian, Rencana Aksi dan Manual IKU	Terlaksana	Telah disusun dan ditetapkan pada Januari 2025
2	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan	Tertunda dan digeser	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I dilakukan pada Triwulan II
3	Penyusunan Renja 2026	Terlaksana	Telah disusun TOR dan RAB Tahun 2026

4	Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI	Terlaksana	Telah dilaksanakan melalui penetapan penanggung jawab pengelola arsip, admin Srikandi dan tim pengawas kearsipan melalui Nota Dinas Sekretaris Deputi Nomor TU.01.01/15/D.I.M.EKO N.1/1/2025 tanggal 16 Januari 2025 tentang Penyampaian Usulan Daftar Pegawai sebagai Pengelola Arsip, Admin Srikandi, dan Tim Pengawas Kearsipan
5	Monev Realisasi Anggaran	Terlaksana	Telah dilaksanakan monev realisasi anggaran bulan Januari-Maret
6	Penyusunan Rencana Penarikan Dana (RPD)	Terlaksana	Telah dilaksanakan pada Januari 2025
7	Monev pencatatan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)	Terlaksana	Telah dilaksanakan pada Januari 2025
8	Monev pemanfaatan aplikasi e-kinerja BKN	Terlaksana	Telah dilaksanakan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai melalui aplikasi e-kinerja BKN
9	Dukungan publikasi konten dan penggunaan logo BerAKHLAK	Terlaksana	Penggunaan logo BerAKHLAK pada bahan paparan
Triwulan II			
1	Pengisian Kertas Kerja Penilaian Mandiri SPIP	Terlaksana	Telah dilaksanakan pengisian kertas kerja penilaian mandiri SPIP pada Juni 2025
2	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan	Terlaksana	Laporan Kinerja Sekretariat Deputi Triwulan I Tahun 2025 telah disampaikan kepada Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama melalui Nota Dinas Nomor: AK.03.01/102/D.I.M.EK

			ON.1/04/2025 tanggal 15 April 2025
3	Penyusunan usulan atas Rancangan Renstra Kemenko Perekonomian	Terlaksana	Masukan atas Matriks Informasi Kinerja dan Indikasi Pendanaan pada Rancangan Renstra Kementerian Koordinator telah disampaikan melalui link: https://tinyurl.com/MatriksRenstraEkon2025-2029
4	Penyusunan Revisi Renja 2025	Tertunda dan Digeser	Sampai dengan Juni 2025 belum ada revisi Renja 2025
5	Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI	Terlaksana	Telah dilaksanakan upaya optimalisasi pemanfaatan Srikandi secara berkala
6	Monev Realisasi Anggaran	Terlaksana	Telah dilaksanakan monev realisasi anggaran periode April-Juni 2025
7	Penyusunan RPD	Terlaksana	Telah disusun RPD sampai dengan Triwulan II-2025
8	Penyusunan hasil tindaklanjut laporan hasil pemantauan SP4N-LAPOR!	Terlaksana	Dari hasil pemantauan sampai dengan Juni 2025, tidak ada pengaduan/pelaporan publik yang ditujukan kepada Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN
9	Penyusunan bahan LOM	Terlaksana	Telah dilaksanakan penyusunan bahan Rapat Kerja Menko Perekonomian bersama Banggar DPR, menindaklanjuti ND Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama Nomor: PR.02.01/130/SET.M.E KON.1/06/2025 tanggal 26 Juni 2025
10	Pemenuhan dokumen pendukung pemeriksaan keuangan BPK	Terlaksana	Dokumen pendukung yang diminta telah diupload pada link yang

			dikoordinasikan oleh Inspektorat
11	Koordinasi hasil rekomendasi BPK	Terlaksana	Hasil rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti
12	Penyampaian usulan data responden internal dan eksternal	Terlaksana	Usulan data responden Survei Penilaian Integritas (SPI)
13	Dukungan publikasi konten dan penggunaan logo BerAKHLAK	Terlaksana	Penggunaan logo BerAKHLAK pada bahan paparan
14	Koordinasi pengusulan Agen Perubahan	Terlaksana	Sekretariat Deputy I telah mengusulkan kandidat Agen Perubahan Deputy I melalui Nota Dinas Nomor: OT.05.01/86/D.I.M.EKO N.1/07/2025 tanggal 10 Juli 2025
Triwulan III			
1	Pemetaan Rencana Aksi RB Tematik 2025	Terlaksana	Telah dilaksanakan bersama Biro Hukum dan Organisasi dan PIC RB Unit pada tanggal 28 Agustus 2025
2	Penyusunan dan Penetapan Tim Kerja	Terlaksana	Sekretariat Deputy telah mengkoordinasikan penyusunan SK Kelompok Kerja di Deputy I sebanyak 21 Kelompok Kerja
3	Penyusunan Matriks Manajemen Risiko	Terlaksana	Telah dilaksanakan koordinasi penyusunan Matriks Manajemen Risiko Unit Deputy, Sekretariat Deputy dan 5 (lima) Asisten Deputy pada Deputy I
4	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan	Terlaksana	Laporan Kinerja Sekretariat Deputy Triwulan II Tahun 2025 telah disampaikan kepada Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama melalui Nota Dinas Nomor: AK.03.01/103/D.I.M.EK ON.1/07/2025 tanggal 14 Juli 2025

5	Fasilitasi evaluasi SAKIP Eselon I	Terlaksana	Telah dilaksanakan tanggal 2 Oktober 2025
6	Penyusunan TOR dan RAB atas revisi Renja 2025	Terlaksana	Sampai dengan Triwulan III belum terdapat revisi Renja namun terdapat revisi TOR dan RAB pada unit Deputi I
7	Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI	Terlaksana	Telah dilaksanakan upaya optimalisasi pemanfaatan Srikandi antara lain untuk: surat masuk, surat keluar, disposisi
8	Monev Realisasi Anggaran	Terlaksana	Telah dilaksanakan monev realisasi anggaran periode Juli-September
9	Penyusunan Rencana Penarikan Dana	Terlaksana	RPD sampai dengan Triwulan III-2025
10	Penyusunan Bukti Dukung IKK	Terlaksana	Sekretariat Deputi I telah mengkoordinasikan penyusunan bukti dukung Indeks Kualitas Kebijakan untuk tema Kredit Usaha Rakyat
11	Penyusunan bahan LOM	Tertunda dan digeser	Belum ada agenda LOM dari Sekretariat
12	Sosialisasi pengisian SPI	Terlaksana	Telah dilaksanakan melalui Nota Dinas Sekretariat Deputi Nomor: PW.06.02/64/D.I.M.EK ON.1/06/2025 tanggal 12 Juni 2025 hal Permintaan Data Dalam Rangka Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK Tahun 2025
13	Dukungan publikasi konten dan penggunaan logo BerAKHLAK	Terlaksana	Penggunaan logo BerAKHLAK pada bahan paparan dan banner
14	Fasilitasi evaluasi pelaksanaan rencana tindak Agen Perubahan	Terlaksana	Nota Dinas Sekretariat Deputi Nomor: OT.05.01/93/D.I.M.EKO N.1/07/2025 tanggal 24 Juli 2025 hal permohonan reuiu

			proposal rencana tindak dan pengisian Survei Integritas Kandidat Agen Perubahan Tahun 2025
Triwulan IV			
1	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan	Terlaksana	Laporan Kinerja Sekretariat Deputi Triwulan III Tahun 2025 telah disampaikan kepada Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama melalui Nota Dinas Nomor: AK.03.01/138/D.I.M.EK ON.1/10/2025 tanggal 10 Oktober 2025
2	Fasilitasi evaluasi AKIP Eselon I	Terlaksana	Telah dilaksanakan koordinasi pelaksanaan evaluasi AKIP Internal Kedeputian 1 tanggal 2 Oktober 2025
3	Penyusunan draft Perjanjian Kinerja Tahun 2026	Tertunda dan digeser	Penyusunan draft Perjanjian Kinerja Tahun 2026 dilaksanakan pada bulan Januari 2026
4	Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI	Terlaksana	Telah dilaksanakan optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI pada periode Oktober – Desember 2025
5	Monev realisasi anggaran	Terlaksana	Telah dilaksanakan monev realisasi anggaran periode Oktober – Desember 2025
6	Implementasi LLAT	Terlaksana	Telah dilaksanakan sosialisasi LLAT tanggal 13 Oktober 2025
7	Penyusunan RPD	Terlaksana	Pemutakhiran RPD Triwulan IV-2025 telah disampaikan kepada Biro MKKS melalui Nota Dinas Nomor: PR.04.01/134/D.I.M.EK ON.1/10/2025 tanggal 8 Oktober 2025

8	Penyusunan hasil tindaklanjut laporan hasil pemantauan SP4N-LAPOR!	Terlaksana	Telah disusun laporan hasil pemantauan SP4N LAPOR! periode Juli-Desember 2025. Pada periode tersebut tidak ada pelaporan maupun pengaduan publik
9	Pengisian SIRUP	Terlaksana	Telah dilaksanakan pada Januari 2025
10	Monev pencatatan SIRUP	Terlaksana	Telah dilaksanakan monev pencatatan SIRUP pada LPSE pada periode Oktober – Desember 2025
11	Penyusunan usulan formasi ASN	Terlaksana	Telah diusulkan pengadaan formasi ASN PPPK untuk jabatan Analis Kebijakan Ahli Pertama di unit Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN melalui ND Nomor: KP.01.02/33/D.I.M.EKO N.1/2/2025 tanggal 6 Februari 2025
12	Penyusunan bahan LOM	Gagal Terlaksana	Sampai dengan akhir tahun 2025, tidak ada agenda LOM dari Sekretariat Kementerian Koordinator
13	Koordinasi hasil rekomendasi BPK	Terlaksana	Hasil Rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti
14	Sosialisasi pengisian SPI	Terlaksana	Pengisian SPI telah disosialisasikan sampai tanggal 31 Oktober 2025 melalui media sosial
15	Dukungan publikasi konten dan penggunaan logo BerAKHLAK	Terlaksana	Penggunaan logo BerAKHLAK pada standing banner
16	Fasilitasi evaluasi pelaksanaan rencana tindak Agen Perubahan	Terlaksana	Telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Rencana Tindak Lanjut Agen Perubahan

			tanggal 18 Desember 2025
--	--	--	--------------------------

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

Triwulan I

1. Diskusi Sosialisasi Mekanisme Kerja pada tanggal 10 Maret 2025 dan 4 Juni 2025 dalam rangka peningkatan pemahaman pembentukan kelompok kerja.
2. Menghadiri undangan Kepala Biro Hukum dan Organisasi Nomor OT.05/42/SET.M.EKON.2/06/2025 tanggal 19 Juni 2025 tentang Pembekalan Kandidat Agen Perubahan Tahun 2025 yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2025.

Triwulan II

1. Rapat Pembentukan Kelompok Kerja pada tanggal 27 Mei 2025.
2. Rapat Reviu dan Finalisasi SK Kelompok Kerja (Pokja) Unit Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN tahun 2025 tanggal 30 Juni 2025.
3. Menyampaikan usulan anggota tim Reformasi Birokrasi (RB) Deputi I Tahun 2025 melalui Nota Dinas Sekretaris Deputi Nomor: OT.05.01/75/D.I.M.EKON.1/06/2025 tanggal 25 Juni 2025.
4. Menyampaikan usulan kelompok kerja unit eselon II Kedeputusan I melalui Nota Dinas Sekretaris Deputi Nomor: OT.04.04/79/D.I.M.EKON.1/06/2025 tanggal 30 Juni 2025.

Triwulan III

1. Diskusi kelembagaan BUMN pasca Danantara bersama Akademisi/Praktisi dari BUMN Research Group Lembaga Management Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia tanggal 26 September 2025, sebagai respon atas transformasi kelembagaan BUMN sebagaimana RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 19 Tahun 2025.
2. Menyampaikan usulan Anggota Kelompok Kerja Penguatan Implementasi Akuntabilitas Kinerja Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tahun 2025 melalui Nota Dinas Nomor: OT.04.04/80/D.I.M.EKON.1/07/2025 tanggal 1 Juli 2025.

Triwulan IV

1. Diskusi Terfokus bersama Kementerian PPN/Bappenas membahas Implikasi Perubahan Nomenklatur Kementerian BUMN dan Strategi Implementasi Perencanaan Pembangunan tanggal 3 Oktober 2025.
2. Dialog Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN tanggal 6 Oktober 2025.
3. Diskusi Aspek Hukum Pengelolaan BUMN dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN tanggal 17 Oktober 2025.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan IV Tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pemanfaatan teknologi untuk pelaksanaan rapat koordinasi melalui *video conference*, rapat koordinasi secara *hybrid* menggunakan fasilitas kantor. Jumlah efisiensi dari pengadaan rapat koordinasi melalui *video conference* tersebut diperkirakan mencapai Rp75.000.000 melalui penghematan biaya paket meeting di hotel. Hasil

efisiensi tersebut dialokasikan untuk kegiatan lain mendukung implementasi RB di Deputi I pada triwulan selanjutnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Berikut ini beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Aplikasi Srikandi sering mengalami kendala teknis seperti bug atau error, berdampak pada keterlambatan, maupun *deadline* tindak lanjut dokumen maupun disposisi yang melewati tenggat waktu.
2. Tingkat partisipasi pegawai dalam pemanfaatan aplikasi Srikandi belum optimal.
3. Disposisi diterima pada hari Sabtu atau Minggu sehingga berdampak pada proses tindak lanjut yang tidak secepat pada hari kerja.
4. Terdapat perubahan kebijakan yang menyebabkan harus dilakukan reviu atau revisi dokumen yang telah di *submit*.
5. Angka yang ada di SPSE tidak tersinkron otomatis dengan SAKTI sehingga perlu double catat.
6. Tingkat partisipasi responden SPI baik internal maupun eksternal yang rendah dikarenakan data responden yang tidak akurat dan nomor Whatsapp/HP tidak aktif.
7. Kegiatan yang akan terjadi di TW IV masih belum terencana dengan baik sehingga RPD berbeda dengan realisasi kegiatan yang telah dilaksanakan.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan IV Tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Responsif dalam mengkoordinasikan kendala teknis pemanfaatan Srikandi kepada tim teknis Biro Umum dan Sumber Daya Manusia.
2. Sosialisasi optimalisasi penggunaan akun Srikandi pada seluruh pegawai unit Kedeputian.
3. Membudayakan komunikasi dua arah untuk memonitor progres tindak lanjut disposisi dari pimpinan.
4. Menetapkan PIC untuk masing-masing isu kegiatan untuk mempermudah tracing progres pekerjaan maupun pencarian kembali dokumen yang dibutuhkan.
5. Monitoring pencatatan pengadaan dan sinkronisasasi secara berkala.
6. Melakukan update database responden survei SPI baik internal maupun eksternal dan memberikan surat edaran yang mewajibkan seluruh responden internal untuk berpartisipasi mengisi survei.
7. Menghitung perkiraan rencana penarikan dengan detail sehingga realisasi dengan rencana penarikan dana tidak terjadi deviasi yang terlalu jauh.

1.2. Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN

Latar Belakang

Tingkat implementasi tata kelola Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN merupakan ukuran yang menggambarkan sejauh mana unit kerja mampu mengimplementasikan tata kelola sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pada praktiknya, implementasi tata kelola diukur dengan dengan pemenuhan bukti dukung pelaksanaan tata kelola di lingkungan Kedeputian. Adapun dokumen data dukung yang dinilai mampu menggambarkan implementasi tata kelola yang baik harus memenuhi 2 (dua) aspek utama, yaitu (1) ketepatan waktu penyampaian laporan berdasarkan periode laporan tertentu (Triwulan I, II, III dan IV) dan tanggal penyampaian dokumen tersebut kepada unit

pengampu (tertera pada ND yang diedarkan unit pengampu), (2) substansi laporan telah sesuai dengan standar atau format yang ditentukan oleh unit pengampu.

Ruang lingkup Implementasi tata kelola diukur dari data dukung dokumen tata kelola meliputi dokumen keuangan, sistem pengendalian internal, data dan informasi, organisasi, tata laksana dan SDM, BMN, kearsipan, humas, protokol, persidangan, naskah pimpinan, hukum, dan SOP.

Pada Triwulan III terdapat perubahan/penyesuaian pemenuhan bukti dukung dalam rangka pencapaian indikator kinerja Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN (IKU 1.2). Perubahan tersebut dilakukan untuk pemenuhan Dokumen Tata Kelola berupa SOP ketepatan waktu dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Bukti Dukung	Keterangan
1	Dokumen SOP Administrasi Keuangan	Dilakukan perubahan standar ketepatan waktu dimana pemenuhan data dukung diubah dari Triwulan III menjadi Triwulan IV 2025. Hal tersebut dilakukan untuk menyesuaikan substansi pengaturan berdasarkan PMK No. 32 Tahun 2025 Tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2026.
2	Dokumen SOP Evaluasi AKIP Internal	Dilakukan penambahan jenis bukti dukung baru dalam rangka pelaksanaan amanah Permenko Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Permenko 8/2024 mengatur bahwa evaluasi akuntabilitas kinerja internal perlu dilakukan pendalaman hingga ke unit kerja Tingkat eselon II sehingga diperlukan adanya SOP tersendiri di lingkungan Deputi 1. Pemenuhan data dukung ditargetkan terwujud pada Triwulan III 2025.

Sehingga bukti dukung dokumen tata kelola menjadi, sebagai berikut:

No	Tata Kelola	Jenis Bukti Dukung	Jumlah Bukti Dukung	Standar Substansi	Standar Ketepatan Waktu
1.	Keuangan	1. TOR dan RAB 2. ND Revisi POK 3. Monitoring Realisasi Anggaran	1. 6 Dokumen 2. 1 Dokumen 3. 12 Dokumen	1. Latar Belakang, Penerima Manfaat, Strategi Pencapaian Keluaran, Biaya yang Dibutuhkan 2. Usulan Penyesuaian Akun Anggaran, Alasan revisi berdasarkan IKU 3. Uraian program/kegiatan/RO/Komponen, Pagu, Realisasi, Sisa anggaran	1. Pertengahan tahun untuk tahun berikutnya 2. Tanggal 25 setiap bulan 3. Tanggal 5 bulan berikutnya
2.	Sistem Pengendalian Internal	1. Kertas Kerja Manajemen Risiko 2. Kertas Kerja SPIP	1. 7 Dokumen 2. 1 Dokumen	1. Form Konteks, Form Profil & Peta Risiko, Form Mitigasi Risiko, 2. Perka BPKP 5/2021	1. Mengacu pada ND Inspektur 2. Mengacu pada ND Inspektur
3.	Tata Laksana dan SDM	1. ND Usulan Kenaikan Pangkat 2. ND Usulan Kenaikan Jenjang	1. 1 Dokumen 2. 1 Dokumen 3. 1 Dokumen	1. Data Pegawai, Dokumen Pendukung 2. Data Pegawai, Dokumen Pendukung	1. Setiap 2 Bulan 2. Mengacu pada ND Kepala Biro Umum dan SDM 3. Mengacu pada

		3. ND Usulan Pendidikan dan Pelatihan		3. Data Pegawai, Dokumen Pendukung	ND Kepala Biro Umum dan SDM
4.	Barang Milik Negara	ND Rencana Kebutuhan BMN	1 Dokumen	Jumlah Kebutuhan, Tahun Anggaran	Mengacu pada ND Kepala Biro Umum dan SDM (Akhir Tahun untuk 2 Tahun Berikutnya)
5.	Kearsipan	Rekap Dokumen dalam Srikandi	12 Rekap Dokumen	1. Dokumen terdisposisi 2. Dokumen tertandatangani 3. Pemberkasan	Tanggal 5 bulan berikutnya
6.	Humas	Akun Instagram	1 Dokumen	1. Laporan Perkembangan Ekonomi 2. Kegiatan Pimpinan	1. 3 hari setelah rilis data BPS 2. 3 hari setelah kegiatan
7.	Naskah Pimpinan	Bahan Sambutan Deputi untuk Apel Pagi	4 Dokumen	Update isu strategis dan kegiatan yang telah dan akan dilakukan	H-3 pelaksanaan Apel Pagi
8.	Standar Operasional Prosedur	1. Dokumen SOP Dialog Kinerja 2. Dokumen SOP Administrasi Keuangan 3. Dokumen <i>Reward and Punishment</i> 4. Dokumen SOP Evaluasi AKIP Internal	1. 1 Dokumen 2. 1 Dokumen 3. 1 Dokumen	1. Diagram Alur Dialog Kinerja 2. Diagram Alur Administrasi Keuangan 3. Diagram Alur <i>Reward and Punishment</i> 4. Diagram Alur pelaksanaan Evaluasi AKIP Internal	1. Triwulan I 2. Triwulan IV 3. Triwulan I 4. Triwulan III
			52 Dokumen		

Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN dihitung berdasarkan seberapa banyak bukti dukung Tata Kelola yang dihasilkan sesuai standar di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN dibandingkan dengan jumlah keseluruhan bukti dukung yang telah dihasilkan. Berikut merupakan formulasi dalam menentukan Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN:

$$\text{Tingkat Implementasi Tata Kelola} = \frac{\text{Total Bukti Dukung Tata Kelola yang Dihasilkan Sesuai Standar}}{\text{Total Bukti Dukung Tata Kelola yang Dihasilkan}} \times 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada Tahun 2025 sebesar 100%. Penetapan target berdasarkan Perjanjian Kinerja Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Tahun 2025. Target tersebut ditetapkan sebagai komitmen Unit Kerja untuk memberikan layanan internal Kedeputian 1 yang prima. Unit Kerja berkomitmen untuk memenuhi seluruh data dukung implementasi tata kelola yang memenuhi standar substansi dan standar ketepatan waktu.

Hingga Triwulan IV Tahun 2025, realisasi tingkat implementasi tata kelola Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN mencapai 100%, yang dihitung berdasarkan total bukti dukung tata kelola yang dihasilkan sesuai standar sebanyak 52 dokumen dari target tahun 2025 sebanyak 52 dokumen, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Triwulan IV	Realisasi Triwulan IV	%Kinerja
IKU-1.2 Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN	%	100	100	100

Dokumen bukti dukung tata kelola yang telah dihasilkan sesuai standar sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 sebanyak 52 dokumen dengan rincian:

No	Indikator	Bukti Dukung	Target	Realisasi
1	Keuangan	1. TOR dan RAB 2. ND Revisi POK 3. Monitoring Realisasi Anggaran	19 Dokumen	19 Dokumen
2	Sistem Pengendalian Internal	1. Kertas Kerja Manajemen Risiko 2. Kertas Kerja SPIP	8 Dokumen	8 Dokumen
3	Tata Laksana dan SDM	1. ND Usulan Kenaikan Pangkat 2. ND Usulan Kenaikan Jenjang 3. ND Usulan Pendidikan dan Pelatihan	3 Dokumen	3 Dokumen
4	Barang Milik Negara	ND Rencana Kebutuhan BMN	1 Dokumen	1 Dokumen
5	Kearsipan	Rekap Dokumen dalam Srikandi	12 Dokumen	12 Dokumen
6	Humas	Akun Instagram	1 Dokumen	1 Dokumen
7	Naskah Pimpinan	Bahan Sambutan Deputi untuk Apel Pagi	4 Dokumen	4 Dokumen
8	Standar Operasional Prosedur	1. Dokumen SOP Dialog Kinerja 2. Dokumen SOP Administrasi Keuangan 3. Dokumen Reward and Punishment 4. Dokumen SOP Evaluasi AKIP Internal	4 Dokumen	4 Dokumen
Total			52 Dokumen	52 Dokumen

Dalam rangka Implementasi Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang baik, sampai dengan Triwulan IV telah dilakukan berbagai upaya pemenuhan standar dan ketepatan waktu serta melaksanakan beberapa rencana aksi sehingga persentase pemenuhan target Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN hingga akhir tahun 2025 dapat terpenuhi 100%.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW IV, Capaian Kegiatan dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 sebagai berikut:

1.2. Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN			
No	Rencana Aksi	Status	Keterangan
Triwulan I			
1	Penyusunan TOR dan RAB	Terlaksana	Telah disusun TOR dan RAB untuk setiap unit kerja sebanyak 6 paket dokumen.
2	Monitoring realisasi anggaran TW I	Terlaksana	Telah dilaksanakan monitoring realisasi anggaran bulan Januari-Maret 2025.
3	Monitoring kenaikan pangkat, jenjang, dan diklat pegawai	Terlaksana	Telah dilaksanakan beberapa hal terkait <i>monitoring</i> kenaikan pangkat, jenjang dan diklat pegawai sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Usulan calon peserta uji kompetensi Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan melalui Nota Dinas Sekretaris Deputi Nomor KP.05.02/27/D.I.M.EKON.1/01/2025 tanggal 31 Januari 2025. 2. Usulan keikutsertaan program Beasiswa LPDP melalui Nota Dinas Sekretaris Deputi Nomor KP.08.07/31/D.I.M.EKON.1/02/2025 tentang Usulan untuk Mengikuti Program Beasiswa LPDP 3. Usulan kenaikan pangkat melalui Nota Dinas Sekretaris Deputi Nomor KP.05.02/38/D.I.M.EKON.1/02/2025 tentang Penyampaian Usulan Kenaikan Pangkat Periode 1 April 2025 4. Usulan peserta <i>workshop</i>

			melalui Nota Dinas Sekretaris Deputi Nomor PR.05.01/46/D.I.M.EKON.1/04/2025 tentang Peserta <i>Workshop Economic Policy Discussion: Designing Impactful Policies</i> .
4	Penyusunan manajemen risiko unit Deputi dan Sesdep	Terlaksana	Telah disusun Formulir Manajemen Risiko (MR) unit Deputi dan Setdep serta pendampingan penyusunan MR bersama Inspektorat kepada 5 unit Asdep.
5	Implementasi kearsipan menggunakan Srikandi	Terlaksana	Telah dilaksanakan pengelolaan arsip aktif secara berkala
6	Penyiapan bahan pimpinan untuk apel pagi	Terlaksana	Telah dilaksanakan apel pagi tanggal 20 Januari 2025
Triwulan II			
1	Revisi POK	Terlaksana	ND Nomor: PR.04.01/76/D.I.M.EKON.1/06/2025 tanggal 26 Juni 2025 tentang Usulan Revisi POK bulan Juni Tahun Anggaran 2025
2	Monitoring realisasi anggaran TW II	Terlaksana	Telah dilaksanakan monitoring realisasi anggaran periode Triwulan I dan II
3	Monitoring kenaikan pangkat, jenjang dan diklat pegawai	Terlaksana	Telah dilaksanakan beberapa hal terkait <i>monitoring</i> kenaikan pangkat, jenjang dan diklat pegawai sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Usulan Peserta <i>Workshop Economic Policy Discussion: Designing Impactful Policies</i> melalui Nota Dinas Deputi 2. Usulan Uji Kompetensi melalui Nota Dinas Sekretaris Deputi Nomor KP.15.09/48/D.I.M.EKON.1/04/2025 tanggal 17 April 2025 tentang Penyampaian Usulan Calon Peserta Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan (JFAK) 3. Usulan Kenaikan Pangkat melalui Nota Dinas Sekretaris Deputi Nomor KP.05.02/70/D.I.M.EKON.1/06/2025 tanggal 20 Juni

			2025 tentang Penyampaian Usulan Kenaikan Pangkat Periode 1 Agustus 2025
4	Rapat Manajemen Risiko bersama Inspektur	Terlaksana	Rapat Penyusunan Dokumen Manajemen Risiko Tahun 2025 bersama Inspektorat tanggal 09 Mei 2025
5	Diskusi Perspektif Manajemen Risiko di Instansi Pemerintah bersama expert	Terlaksana	Diskusi Perspektif Manajemen Risiko pada Instansi Pemerintah (Studi Kasus pada Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN) bersama akademisi Institut Pertanian Bogor pada tanggal 28 Mei 2025.
6	Implementasi kearsipan menggunakan Srikandi	Terlaksana	Telah dilaksanakan pengelolaan arsip aktif secara berkala pada Triwulan II 2025
7	Publikasi perkembangan ekonomi TW I dan kegiatan pimpinan TW II	Terlaksana	Publikasi perkembangan ekonomi melalui akun instagram Deputi1
8	Penyiapan bahan pimpinan untuk Apel Pagi	Terlaksana	Telah dilaksanakan koordinasi dukungan teknis penyusunan bahan apel pagi bagi pimpinan melalui Nota Dinas Sekretaris Deputi Nomor TU.05.01/54/D.I.M.EKON.1/04/ 2025 tanggal 24 April 2025 tentang Permohonan Izin Kegiatan Diskusi.
9	Diskusi peran Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN pasca dibentuknya BPI Danantara	Terlaksana	Telah dilaksanakan Diskusi bersama Akademisi LPEM UI tanggal 19 Mei 2025
Triwulan III			
1	Revisi POK	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> • ND Nomor: PR.04.01/95/D.I.M.EKON.1/ 07/2025 tanggal 25 Juli 2025 hal Usulan Revisi POK bulan Juli Tahun Anggaran 2025 • ND Nomor: PR.04.01/114/D.I.M.EKON. 1/08/2025 tanggal 26

			<p>Agustus 2025 hal Usulan Revisi POK bulan Agustus Tahun Anggaran 2025</p> <ul style="list-style-type: none"> • ND Nomor: PR.04.01/124/D.I.M.EKON.1/09/2025 tanggal 26 <p>September 2025 hal Usulan Revisi POK bulan September Tahun Anggaran 2025</p>
2	Monitoring realisasi anggaran TW III	Terlaksana	Telah dilaksanakan monitoring realisasi anggaran sampai dengan Triwulan III
3	Persiapan audit internal SPIP	Terlaksana	<p>Dalam rangka persiapan audit internal SPIP, Sekretariat Deputi telah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menunjuk counterpart Penilaian Mandiri SPIP. Nota Dinas Nomor: PW.06.05/63/D.I.M.EKON.1/06/2025 tanggal 11 Juni 2025. 2. Mengikuti Bimbingan Teknis Pengisian Kertas Kerja Penilaian Mandiri SPIP 2025 yang diselenggarakan oleh Biro MKKS tanggal 10 Juli 2025. 3. Melaksanakan rapat pembahasan SPIP di Internal Deputi I tanggal 18 Juli 2025.
4	Monitoring kenaikan pangkat, jenjang dan diklat pegawai	Terlaksana	<p>Telah dilaksanakan beberapa hal terkait kepegawaian antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan usulan pegawai yang telah memenuhi uji kompetensi kenaikan Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan. 2. Mengusulkan pegawai untuk mengikuti program beasiswa LPDP Gelombang II tahun 2025. 3. Penyampaian usulan kenaikan pangkat pegawai periode 1 Oktober 2025. 4. Penyampaian usulan peserta seminar "Road to Scholarship for ASN". 5. Penyampaian usulan peserta pelatihan Artificial Intelligence "GARUDA".

5	Implementasi kearsipan menggunakan Srikandi	Terlaksana	Telah dilaksanakan pengelolaan arsip aktif secara berkala pada Triwulan III 2025
6	Publikasi perkembangan ekonomi TW II dan kegiatan pimpinan TW III	Terlaksana	Publikasi perkembangan ekonomi terkini serta kegiatan pimpinan melalui berita maupun siaran pers pada website ekon.go.id
7	Penyiapan bahan pimpinan untuk Apel Pagi	Terlaksana	Sekretariat Deputi telah mengkoordinasikan penyusunan bahan Sambutan Apel Pagi tanggal 7 Juli 2025 dan 1 September 2025.
8	Penyusunan SOP Dialog Kinerja, Administrasi Keuangan, Reward dan Punishment	Terlaksana	Deputi I telah menerbitkan Surat Edaran (SE): <ul style="list-style-type: none"> • SE Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Dialog Kinerja di Lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN. • SE Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pemberian Reward dan Punishment di Lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN • SE Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal di Lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN.
9	Penyusunan Kertas Kerja SPIP	Terlaksana	Kertas Kerja Hasil Penilaian Mandiri SPIP Deputi I telah disampaikan kepada Biro MKKS melalui Nota Dinas Nomor: AK.04.02/91/D.I.M.EKON.1/07/2025 tanggal 23 Juli 2025.
Triwulan IV			
1	Revisi POK	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> • ND Nomor PR.04.01/147/D.I.M.EKON.1/10/2025 Tanggal 27 Oktober 2025 Hal Usulan Revisi POK bulan Oktober Tahun Anggaran 2025 • ND Nomor PR.04.01/156/D.I.M.EKON.

			<p>1/11/2025 Tanggal 21 November 2025 Hal Usulan Revisi POK Tahun Anggaran 2025</p> <ul style="list-style-type: none"> • ND Nomor PR.04.01/162/D.I.M.EKON. 1/12/2025 Tanggal 3 Desember 2025 Hal Usulan Revisi POK bulan Desember Tahun Anggaran 2025 • ND Nomor PR.04.01/164/D.I.M.EKON. 1/12/2025 Tanggal 8 Desember 2025 Hal Usulan Revisi POK bulan Desember Tahun Anggaran 2025
2	Monitoring realisasi anggaran tahunan	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Telah dilaksanakan rapat pembahasan evaluasi anggaran pada tanggal 4 Desember 2025 dan 17 Desember 2025 • Telah dilakukan monitoring realisasi anggaran secara rill time melalui spreadsheet pada tautan berikut : https://bit.ly/2025AnggaranD1
3	Monitoring kenaikan pangkat, jenjang dan diklat pegawai	Terlaksana	<p>Penyampaian usulan kenaikan pangkat periode November 2025 telah disampaikan kepada Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui Nota Dinas Nomor: KP.05.02/144/D.I.M.EKON.1/10/2025 tanggal 21 Oktober 2025</p>
4	Implementasi kearsipan menggunakan Srikandi	Terlaksana	<p>Telah dilakukan implementasi kearsipan menggunakan srikandi periode Oktober-Desember 2025</p>
5	Publikasi perkembangan ekonomi TW III dan kegiatan pimpinan TW IV	Terlaksana	<p>Publikasi pertumbuhan ekonomi TW III telah dilaksanakan tanggal 5 November 2025 dan kegiatan Deputi I telah dipublikasikan melalui siaran pers website ekon.go.id</p>
6	Penyiapan bahan pimpinan untuk Apel Pagi	Terlaksana	<p>Telah disusun bahan sambutan Apel Pagi Deputi I tanggal 13 Oktober 2025</p>

7	Monitoring BMN unit D1	Terlaksana	Telah dilakukan monitoring dan rekonsiliasi laptop BMN pada tanggal 21 November 2025 melalui spreadsheet Database Device D1 dan dilakukan konfirmasi ke masing-masing pegawai
---	------------------------	------------	---

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah dengan melaksanakan kegiatan yaitu:

Triwulan I

1. Mengikuti Sosialisasi Implementasi Manajemen Risiko (MR) dan Bimbingan Teknis Pengisian Form MR yang dilaksanakan Inspektorat.
2. Fasilitasi *Coaching Clinic* pengisian Form MR keasdepan dan *One on One Review* bersama Inspektorat.
3. Penyampaian Nota Dinas Sekretaris Deputi Nomor PR.04.01/41/D.I.M.EKON.1/02/2025 tanggal 28 Februari 2025 tentang Usulan Revisi POK bulan Februari Tahun Anggaran 2025.

Triwulan II

1. Diskusi Terfokus Perspektif Manajemen Risiko pada Instansi Pemerintah dengan Narasumber Akademisi dari IPB University.
2. Menyampaikan usulan calon peserta Uji Kompetensi melalui Nota Dinas Sekretaris Deputi Nomor KP.15.09/49/D.I.M.EKON.1/04/2025 tanggal 21 April 2025 tentang Penyampaian Usulan Calon Peserta Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan (JFAK).
3. Menyampaikan usulan izin belajar melalui Nota Dinas Sekretaris Deputi Nomor KP.08.08/57/D.I.M.EKON.1/05 tanggal 20 Mei 2025 tentang Penyampaian Laporan Izin Belajar atas Nama Arina Nur Fitri.
4. Menyampaikan Nota Dinas Sekretaris Deputi Nomor EK.05.01/58/D.I.M.EKON.1/05/2025 tanggal 26 Mei 2025 tentang Permohonan Izin Diskusi Manajemen Risiko dan Zona Integritas.
5. Rapat Pendampingan Pengelolaan Arsip Aktif tanggal 3 Juni 2025.
6. Menyampaikan Nota Dinas Sekretaris Deputi Nomor PW.06.09/62/D.I.M.EKON.1/06/2025 tanggal 10 Juni 2025 tentang Permohonan Masukan Draft Manajemen Risiko Deputi I.
7. Menyampaikan usulan keikutsertaan pelatihan melalui Nota Dinas Sekretaris Deputi Nomor KP.08.06/78/D.I.M.EKON.1/06/2025 tanggal 30 Juni 2025 tentang Usulan Keikutsertaan Pegawai Deputi I pada Pelatihan Semester II Tahun 2025.

Triwulan III

1. Menyampaikan usulan PIC dari Sekretariat Deputi I terkait Penyusunan Instrumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Tahun 2025 melalui Nota Dinas Nomor: OT.04.04/82/D.I.M.EKON.1/07/2025 tanggal 3 Juli 2025.
2. Melaksanakan *one on one review* Kertas Kerja Manajemen Risiko keasdepan bersama Inspektorat pada tanggal 22-23 Juli 2025.
3. Melaksanakan diskusi kelembagaan BUMN pasca Danantara bersama Akademisi tanggal 26 September 2025 sebagai respon atas rencana penyusunan RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Triwulan IV

1. Melaksanakan Rapat Mekanisme Pembayaran Atas Pekerjaan Yang Diselesaikan Pada Akhir Tahun Anggaran melalui rekening penampungan akhir tahun anggaran (RPATA) bersama bagian keuangan tanggal 8 Desember 2025.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan IV Tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pelaksanaan rapat koordinasi seperti *one on one review* secara *hybrid* menggunakan fasilitas kantor, sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan sekitar Rp49.000.000. Hasil efisiensi tersebut dialokasikan untuk rencana aksi implementasi tata kelola Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Berikut ini beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Belum ada mekanisme insentif atau apresiasi di lingkungan internal Deputy bagi unit atau pegawai yang berhasil mendorong perbaikan tata kelola secara signifikan;
2. Jumlah dan kompetensi SDM yang mengelola isu tata kelola dalam unit kerja masih terbatas, sehingga pelaksanaan pembinaan dan evaluasi belum maksimal.
3. Pada aplikasi Srikandi masih terdapat kekurangan server yang sering eror dan disposisi surat tidak realtime.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan IV Tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait Reward and Punishment di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN;
2. Melaksanakan *Knowledge Sharing* atau sosialisasi terkait implementasi tata kelola di Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN.
3. Melaporkan secara aktif setiap *error* melalui portal resmi "layanan.arsip.go.id" dengan melampirkan tangkapan layar (*screenshot*) kendala Melakukan pengecekan berkala disposisi surat.

1.3. Tingkat Efektivitas

Perencanaan Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN

Latar Belakang

Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN merupakan ukuran yang menggambarkan efektivitas perencanaan unit kerja sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pada prakteknya, Tingkat Efektivitas Perencanaan diukur dengan dengan pemenuhan bukti dukung pelaksanaan perencanaan di lingkungan Kedeputusan. Adapun dokumen data dukung yang dinilai mampu menggambarkan Tingkat Efektivitas Perencanaan yang baik harus memenuhi 2 (dua) aspek utama, yaitu (1) ketepatan waktu penyampaian laporan berdasarkan periode laporan tertentu (Triwulan I, II, III dan IV) dan tanggal penyampaian dokumen tersebut kepada unit pengampu (tertera pada ND yang diedarkan unit pengampu), (2) substansi laporan telah sesuai dengan standar atau format yang ditentukan oleh unit pengampu.

Ruang lingkup Tingkat Efektivitas Perencanaan diukur dari data dukung dokumen perencanaan meliputi dokumen:

1. Rencana Strategis (Renstra) Deputi, paling lambat harus disahkan 5 (lima) bulan setelah RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) disahkan. Adapun standar penyusunan mengacu pada Permen PPN/Kepala Bappenas tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga.
2. Perjanjian Kinerja (PK), Manual IKU, Rencana Aksi, paling lambat harus ditetapkan pada akhir januari tahun berjalan. Adapun standar penyusunan dokumen ini mengacu pada PermenPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. TOR RAB, paling lambat harus selesai bulan juli waktu berjalan untuk digunakan pada tahun setelahnya. Adapun standar penyusunan mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran.
4. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), paling lambat akhir Februari. Adapun Permenpan 6 tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN).

Memperhatikan perkembangan terkini terkait penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kemenko Perekonomian, Sekretariat Deputi mengusulkan perubahan pemenuhan dokumen pendukung capaian kinerja Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN, khususnya untuk standar ketepatan waktu dokumen Renstra Deputi yang semula Triwulan I-2025 diubah menjadi Triwulan IV-2025. Penyesuaian ini dilakukan karena penyusunan Renstra Deputi masih menunggu penetapan Renstra Kemenko Perekonomian. Perubahan ini juga berdampak pada target triwulan I s.d. III, yang semula 100% menjadi 95% (28 dokumen dari total 29 dokumen pendukung yang ditargetkan). Sehingga rincian pemenuhan dokumen pendukung menjadi sebagai berikut:

No	Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen	Standar Substansi	Standar Ketepatan Waktu
1.	Rencana Strategis (Renstra) Deputi	1 Dokumen	1. Pendahuluan 2. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis 3. Arah Kebijakan Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan 4. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan 5. Penutup dan Lampiran (Permen PPN/Bappenas 10/2023)	Triwulan IV 2025
2.	Perjanjian Kinerja	7 Dokumen	<i>Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound</i>	2 Januari 2025
3.	Manual IKU	7 Dokumen	<i>Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound</i>	2 Januari 2025

4.	Rencana Aksi	7 Dokumen	Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Utama, Target, Inisiatif Strategis, Rencana Aksi Kinerja	2 Januari 2025
5.	TOR dan RAB	6 Dokumen	Latar Belakang, Penerima Manfaat, Strategi Pencapaian Keluaran, Biaya yang Dibutuhkan	Pertengahan tahun untuk tahun berikutnya
6.	Sasaran Kinerja Pegawai	1 Paket Dokumen	1. Rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi 2. Rencana hasil kerja 3. Aspek 4. Indikator kinerja individu 5. Target	2 Januari 2025
Total		29 Dokumen		

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada Tahun 2025 sebesar 100%, sementara target triwulan IV sebesar 95%. Penetapan target berdasarkan Perjanjian Kinerja Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Tahun 2025. Target 100% ditetapkan sebagai komitmen Unit Kerja untuk mendukung perencanaan kinerja maupun anggaran Kedeputian 1 yang merupakan bagian vital dalam pelaksanaan tupoksi. Dengan target 100%, proses pelaksanaan program dan kegiatan Kedeputian 1 diharapkan dapat berjalan dengan baik. Unit Kerja berkomitmen untuk memenuhi seluruh data dukung efektivitas perencanaan yang memenuhi standar substansi dan standar ketepatan waktu.

Hingga Triwulan IV Tahun 2025, realisasi Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN telah mencapai 100% dari target Tahun 2025 sebanyak 29 dokumen, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Triwulan IV	Realisasi Triwulan IV	%Kinerja
IKU-1.3 Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN	Persen	100	100	100

Dokumen perencanaan yang telah dihasilkan sesuai standar pada Triwulan IV Tahun 2025 sebanyak 29 dokumen, yaitu:

No	Indikator	Bukti Dukung	Target	Realisasi
1	Rencana Strategis (Renstra) Deputi	Renstra	1 Dokumen	1 Dokumen
2	Perjanjian Kinerja	PK	7 Dokumen	7 Dokumen
3	Manual IKU	Manual IKU	7 Dokumen	7 Dokumen

4	Rencana Aksi	Renaksi	7 Dokumen	7 Dokumen
5	TOR dan RAB	TOR dan RAB	6 Dokumen	6 Dokumen
6	Sasaran Kinerja Pegawai	SKP	1 Paket Dokumen	1 Paket Dokumen
Total			29 Dokumen	29 Dokumen

Dalam rangka pemenuhan dokumen perencanaan Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN, telah dilakukan berbagai upaya pemenuhan standar dan ketepatan waktu serta melaksanakan renaksi sehingga bukti dukung yang menjadi indikator penilaian sampai dengan akhir tahun 2025 dapat terpenuhi sebanyak 29 dokumen dan Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN dapat tercapai 100%.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW IV, Capaian Kegiatan dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 sebagai berikut:

1.3. Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN			
No	Rencana Aksi	Status	Keterangan
Triwulan I			
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja dan Anggaran	Terlaksana	Telah ditetapkan pada Januari 2025
2	Penyusunan TOR dan RAB	Terlaksana	Telah disusun pada Januari 2025
3	Penyusunan SKP tahun 2025	Terlaksana	Telah disusun pada Januari 2025
4	Diskusi Penyusunan Rencana Strategis Deputy bersama Akademisi	Terlaksana	Diskusi bersama Akademisi yang juga merupakan Associate Director BUMN Research Group tentang Penajaman Arah Kebijakan dan Strategi Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN telah dilaksanakan tanggal 22 Januari 2025
Triwulan II			

1	Masukan Renstra Kementerian	Terlaksana	Telah dikoordinasikan masukan atas Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui Nota Dinas Sekretaris Deputi Nomor PR.01.03/59/D.I.M.EKON.1/06/2025 tanggal 3 Juni 2025 tentang Permohonan Masukan atas Matriks Informasi Kinerja dan Indikasi Pendanaan pada Rancangan Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
2	Evaluasi dan penilaian SKP TW I	Terlaksana	Telah dilaksanakan evaluasi dan penilaian SKP TW I 2025
3	Penyusunan Rencana Anggaran Tahun 2026	Terlaksana	Telah disusun TOR dan RAB Tahun Anggaran 2026
Triwulan III			
1	Penyusunan Renstra Deputi	Terlaksana	Telah disusun draft Renstra Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN, finalisasi dan penetapan Renstra Deputi menunggu penetapan Renstra Kemenko Perekonomian. Draft renstra Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN dapat diakses melalui tautan: https://bit.ly/RenstraD1_2025-2029
2	Evaluasi dan penilaian SKP TW II	Terlaksana	Dokumen evaluasi/penilaian SKP Triwulan II telah diupload pada tautan: https://tinyurl.com/PPK-2025
Triwulan IV			
1	Evaluasi dan penilaian SKP TW III dan IV	Terlaksana	Dokumen evaluasi/penilaian SKP Triwulan III dan IV telah diupload pada tautan: https://tinyurl.com/PPK-2025

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja antara lain:

Triwulan I

1. Mengikuti rapat yang dilaksanakan Biro Manajemen Kinerja dan Kerjasama antara lain: (1) pembahasan format program kerja tanggal 7 Januari 2025, (2) penyelarasan Program Kerja antara Kemenko Perekonomian dengan Arah Kebijakan dan Strategi dalam dokumen Perencanaan dan Pembangunan

- Nasional serta Program Kerja Kementerian/Lembaga di lingkup Perekonomian tanggal 9-10 Januari 2025, (3) pembahasan usulan kegiatan prioritas dan identifikasi kerjasama unit kerja dengan pihak lain tanggal 4 Februari 2025;
2. Mengikuti rapat pembahasan Isu Strategis dan Usulan Quick Wins Triwulan II Tahun 2025 tanggal 8 Januari 2025 dipimpin oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
 3. Dialog Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN tanggal 8 Januari 2025;
 4. Dialog Kinerja Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN tanggal 20 Januari 2025.

Triwulan II

1. Dialog Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN tanggal 10 April 2025;
2. Rapat Pembahasan Penyusunan TOR RAB Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN pada tanggal 18 Juni 2025;
3. Rapat tindak lanjut hasil reviu Draft Manual IKU dan Rencana Aksi (Renaksi) tanggal 23 Juni 2025;
4. Menyampaikan Permohonan Masukan Bahan Rapat Kerja Menteri Koordinator Bidang Perekonomian bersama Badan Anggaran DPR RI melalui Nota Dinas Sekretaris Deputy Nomor PR.02.01/77/D.I.M.EKON.1/06/2025 tanggal 30 Juni 2025.

Triwulan III

1. Dialog Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN tanggal 8 Juli 2025 membahas Capaian Kinerja Semester I-2025 dan Rencana Kegiatan Semester II-2025.

Triwulan IV

1. Rapat pembahasan pemetaan peraturan turunan Undang-Undang Nomor 1/2025 dan UU 16/2025 tentang BUMN tanggal 20 November 2025, 24 November 2025 dan 25 November 2025.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan IV Tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pelaksanaan Rapat Koordinasi Internal/Dialog Kinerja Deputy I menggunakan fasilitas kantor, sehingga proyeksi efisiensi dari paket meeting, uang saku dan transport diperkirakan sebesar Rp192.900.000. Hasil efisiensi tersebut dialokasikan untuk rencana aksi atau kegiatan pendukung lain pada triwulan selanjutnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Berikut ini beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Dinamika pergantian pemerintahan dan perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK);
2. Jadwal penyusunan dokumen perencanaan (misalnya RPJMN, RKP, RKAP BUMN, Renstra K/L) tidak sinkron, menyebabkan kesulitan menyelaraskan perencanaan lintas institusi secara efektif;
3. Keterlambatan *input* dari kementerian/lembaga terkait sehingga proses sinkronisasi program kerja lebih lama.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan III Tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada periode selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Pemetaan risiko kelembagaan untuk setiap perubahan struktur, disertai skenario penyesuaian rencana koordinasi;
2. Penyusunan *draft* rencana strategis unit kerja mengacu pada Dokumen Perencanaan Teknokratik;
3. Penguatan fungsi monitoring progres masukan melalui PIC kementerian/lembaga untuk mempercepat identifikasi hambatan dan memperlancar arus informasi.

**1.4. Tingkat Ketaatan
Pelaporan Deputi
Bidang Koordinasi
Pengelolaan dan
Pengembangan
Usaha BUMN**

Latar Belakang

Ketaatan Pelaporan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN merupakan ukuran yang menggambarkan sejauh mana unit kerja dapat memenuhi kewajiban penyampaian laporannya secara tepat waktu, lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ketaatan ini dinilai berdasarkan 2 (dua) aspek utama, yaitu (1) ketepatan waktu penyampaian laporan berdasarkan periode laporan tertentu (Triwulan II, II, III dan IV) dan tanggal penyampaian dokumen tersebut kepada unit pengampu (tertera pada ND yang diedarkan unit pengampu), (2) substansi laporan telah sesuai dengan standar atau format yang ditentukan oleh unit pengampu. Adapun standar laporan yang diacu adalah Peraturan Menpan RB nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Permenpan 6 tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN).

Adapun ruang lingkup laporan yang termasuk pada indikator ini meliputi:

1. Laporan Kinerja Triwulan II s.d. IV (10 hari kerja setelah triwulan berakhir)
2. E-Monev (2 hari kerja pada tiap bulan)
3. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (akhir Februari pada tahun berjalan)
4. Laporan SKP Triwulan II s.d. IV (minggu terakhir pada bulan ke 4,7,10 dan 12).

Laporan dikatakan memenuhi standar jika telah memenuhi standar substansi dan ketepatan waktu dengan rincian sebagai berikut:

No	Laporan	Jumlah Laporan	Standar Substansi	Standar Ketepatan Waktu
1	Laporan Kinerja Triwulan II s.d. IV	4 Dokumen	1. Ringkasan Kinerja Triwulanan 2. Narasi setiap IKU a. Latar belakang b. Hasil pengukuran kinerja c. Pelaksanaan rencana aksi triwulanan, capaian kegiatan dan efisiensi penggunaan sumber daya d. Kendala dan upaya perbaikan pencapaian target	10 hari kerja setelah triwulan berakhir

2	E-Monev	12 Dokumen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan komponen <ol style="list-style-type: none"> a. Status pelaksanaan b. Realisasi fisik c. Realisasi anggaran 2. Pemantauan rincian output Renja <ol style="list-style-type: none"> a. Status pelaksanaan b. Realisasi fisik c. Realisasi anggaran 	2 hari kerja pada tiap bulan
3	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1 Dokumen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar isi 2. Peristiwa penting tahun 2025 3. Ringkasan eksekutif 4. Bab I : Pendahuluan 5. Bab II : Perencanaan Kinerja 6. BAB III : Akuntabilitas Kinerja 7. BAB IV : Evaluasi dan Kinerja 8. BAB V : Kesimpulan dan Penutup 	Akhir Februari
4	Laporan SKP Triwulan II s.d. IV	5 Paket Dokumen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana hasil kinerja pimpinan yang diintervensi 2. Rencana hasil kerja 3. Aspek Indikator Kinerja Individu 4. Target 5. Realisasi berdasarkan bukti dukung 6. Umpan balik berkelanjutan berdasarkan bukti dukung 	Minggu terakhir pada bulan 4, 7, 10, dan 12

Adapun formula perhitungan indikator Tingkat Ketaatan Pelaporan adalah sebagai berikut:

$$\text{Tingkat ketaatan pelaporan} = \frac{\text{Total laporan yang memenuhi standar}}{\text{Total laporan yang disusun}} \times 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2025 sebesar 100%, dengan target Triwulan IV sebesar 60%. Penetapan target tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN. Target 100% ditetapkan sebagai komitmen Unit Kerja untuk mendukung ketaatan pelaporan Kedepuitan 1 yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tupoksi atas penggunaan anggaran. Ketaatan pelaporan merupakan hal yang mutlak harus dipenuhi karena menggambarkan pertanggungjawaban organisasi. Unit Kerja berkomitmen untuk memenuhi seluruh data dukung ketaatan pelaporan yang memenuhi standar substansi dan standar ketepatan waktu.

Hingga Triwulan IV tahun 2025, realisasi Tingkat Ketaatan Pelaporan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN mencapai 100% atau sebanyak 21 dokumen laporan dari target 2025 sebanyak 21 dokumen laporan, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Triwulan IV	Realisasi Triwulan IV	%Kinerja
IKU-1.4 Tingkat Ketaatan Pelaporan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN	%	100	100	100

Dokumen laporan yang telah disusun sesuai standar ketepatan waktu dan standar substansi sebanyak 15 dokumen yaitu:

No	Indikator	Bukti Dukung	Target	Realisasi
1	Laporan Kinerja Triwulan II s.d IV	Lapkin TW II s.d IV	3 dokumen	3 dokumen
2	E-Monev	E-Monev	12 dokumen	12 dokumen
3	Laporan Akuntabilitas Instansi Kinerja Pemerintah	LAKIP	1 dokumen	1 dokumen
4	Laporan SKP Triwulan I s.d IV	Laporan SKP TW I s.d. IV	5 paket dokumen	5 paket dokumen
Total			21 dokumen	21 dokumen

Dalam rangka Implementasi Ketaatan Pelaporan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN, sampai dengan Triwulan IV telah dilakukan berbagai upaya pemenuhan standar dan ketepatan waktu serta melaksanakan beberapa rencana aksi sehingga persentase pemenuhan target Tingkat Ketaatan Pelaporan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN hingga akhir tahun 2025 dapat terpenuhi 100%.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW IV, Capaian Kegiatan dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 sebagai berikut:

1.4. Tingkat Ketaatan Pelaporan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN			
No	Rencana Aksi	Status	Keterangan
Triwulan I			
1	Penyusunan LAKIP Tahun 2024	Terlaksana	Telah selesai disusun dan ditetapkan pada akhir Desember 2024
2	Pengelolaan Laporan melalui E-Monev	Terlaksana	Telah dilaksanakan pengelolaan E-Monev pada Januari – Januari 2025

3	Rapat Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Tahun 2025	Terlaksana	Telah dilaksanakan Rapat Pertanggungjawaban Anggaran Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN pada 17 Januari 2025
4	Pelaporan SKP target 2025	Terlaksana	Telah dilaksanakan pelaporan SKP Target 2025 mengacu pada Nota Dinas Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia.
Triwulan II			
1	Rapat Evaluasi Kinerja dan Anggaran TW I	Terlaksana	Telah dilaksanakan Dialog Kinerja Deputy I tanggal 10 April 2025 dan Dialog Kinerja Sekretariat Deputy tanggal 27 Mei 2025
2	Penyusunan Laporan Kinerja TW I	Terlaksana	Laporan Kinerja Triwulan I Sekretariat Deputy telah disampaikan melalui Nota Dinas Nomor: AK.03.01/102/D.I.M.EKON.1/04/2025 tanggal 15 April 2025 dan telah diunggah pada website kinerja.ekon.go.id
3	Pengelolaan Laporan melalui E-Monev	Terlaksana	Telah dilaksanakan pengelolaan E-Monev pada Januari – Juni 2025
4	Pelaporan penilaian SKP TW I	Terlaksana	Dokumen evaluasi/penilaian SKP Triwulan I telah diupload pada tautan: https://tinyurl.com/PPK-2025
Triwulan III			
1	Rapat Evaluasi Kinerja dan Anggaran TW II	Terlaksana	Telah dilaksanakan Dialog Kinerja Sekretariat Deputy pada tanggal 4 Juli 2025 dan Dialog Kinerja Deputy I pada tanggal
2	Penyusunan Laporan Kinerja TW II	Terlaksana	Laporan Kinerja Triwulan II Sekretariat Deputy telah disampaikan melalui Nota Dinas Nomor: AK.03.01/103/D.I.M.EKON.1/07/2025 tanggal 14 Juli 2025 dan telah diunggah pada website kinerja.ekon.go.id
3	Pengelolaan Laporan melalui E-Monev	Terlaksana	Telah dilaksanakan pengelolaan E-Monev pada Januari – September 2025
4	Pelaporan penilaian SKP TW II	Terlaksana	Dokumen evaluasi/penilaian SKP Triwulan II telah diupload

			pada tautan: https://tinyurl.com/PPK-2025
Triwulan IV			
1	Rapat Evaluasi Kinerja dan Anggaran TW III	Terlaksana	Telah dilaksanakan Rapat Pemantauan Evaluasi Kinerja tanggal 30 Oktober 2025 dan Rapat Pembahasan Evaluasi Anggaran tanggal 4 dan 17 Desember 2025
2	Penyusunan Laporan Kinerja TW III	Terlaksana	Laporan Kinerja Sekretariat Deputi Triwulan III Tahun 2025 telah disampaikan kepada Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama melalui Nota Dinas Nomor: AK.03.01/138/D.I.M.EKON.1/10/2025 tanggal 10 Oktober 2025
3	Penyusunan Narasi Capaian Tahun 2025	Terlaksana	Narasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dalam proses penyusunan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025 yang dapat diakses melalui tautan: https://bit.ly/LAKIP2025_DEPU TI1
4	Pengelolaan Laporan melalui E-Monev	Terlaksana	Telah dilakukan pengelolaan laporan melalui e monev periode Oktober-Desember 2025
5	Pelaporan penilaian SKP TW III dan IV	Terlaksana	Dokumen evaluasi/penilaian SKP Triwulan III dan IV telah diupload pada tautan: https://tinyurl.com/PPK-2025

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja antara lain:

1. Pengumpulan data capaian kegiatan bulan Januari-Februari 2025 melalui Nota Dinas Sekretaris Deputi Nomor: AK.02.01/40/D.I.M.EKON.1/03/2025 tanggal 3 Maret 2025.
2. Pengumpulan data capaian kegiatan Triwulan II-2025 melalui Nota Dinas Sesdep Nomor: AK.02.01/44/D.I.M.EKON.1/04/2025 tanggal 9 April 2025.
3. Penyampaian dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) s.d. Triwulan II 2025 dengan tepat waktu.
4. Penyampaian Laporan Kinerja Sekretariat Deputi s.d. Triwulan II T.A 2025 dengan tepat waktu.
5. Penyampaian permohonan Narasi Kinerja Triwulan III T.A 2025 dari keasdepan melalui Nota Dinas Nomor: AK.03.01/130/D.I.M.EKON.1/10/2025 tanggal 3 Oktober 2025.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan IV Tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh

implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pelaksanaan Rapat Koordinasi Internal/Dialog Kinerja Deputy maupun Sekretariat Deputy I menggunakan fasilitas kantor, sehingga proyeksi efisiensi dari paket meeting, uang saku dan transport diperkirakan sebesar Rp192.900.000. Hasil efisiensi tersebut dialokasikan untuk rencana aksi atau kegiatan pendukung lain pada triwulan selanjutnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan IV 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Berikut ini beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Pelaporan memerlukan kontribusi dari beberapa bidang, sering kali terkendala karena kurangnya koordinasi, keterlambatan input data, atau perbedaan persepsi antar bagian;
2. Belum adanya sistem pemantauan progres pelaporan dari unit kerja sehingga pimpinan terbatas dalam identifikasi secara dini unit/bidang mana yang berpotensi tidak mencapai target pelaporan;
3. Sering kali terjadi perubahan format atau penambahan kebutuhan laporan unit kerja pengampu, sementara sistem pengumpulan data dan pembagian tugas belum fleksibel untuk merespons cepat.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan IV 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Membentuk tim pelaporan lintas eselon II pada Deputy, dengan menetapkan PIC masing-masing unit kerja agar memiliki persepsi yang sama dan koordinasi penyampaian data lebih tepat waktu;
2. Mengembangkan *dashboard* sederhana guna memantau progres pelaporan dari unit kerja;
3. Menyusun laporan dengan format sebelumnya dan melakukan penyesuaian segera untuk meminimalisir keterlambatan akibat perubahan format.

1.5. Persentase Penyelesaian Isu Strategis yang Diberikan oleh Deputi

Latar Belakang

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengamanatkan Sekretaris Deputy untuk dapat menjalankan penugasan lain yang diberikan oleh Deputy. Penugasan ini dapat bersifat tata kelola dan substantif yang bersifat lintas keasdepan. Khusus untuk penugasan yang bersifat substantif, Sekretaris Deputy bertanggung jawab untuk melaksanakan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian terhadap isu-isu strategis yang menjadi fokus ke depan.

Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN mendapat penugasan tambahan berupa koordinasi monitoring dan evaluasi isu strategis Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). SPHP menjadi faktor penting dalam upaya menjaga inflasi pangan tetap terkendali serta menjaga ketahanan pangan. Dalam rapat koordinasi penyusunan draft Instruksi Presiden tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang diselenggarakan oleh Kemenko Pangan, disampaikan bahwa Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian diamanatkan untuk memastikan kebijakan pengadaan dan pengelolaan gabah/beras dalam negeri, serta penyaluran Cadangan Beras Pemerintah selaras dengan strategi ketahanan pangan nasional dan kebijakan ekonomi makro, termasuk stabilisasi

pasokan dan harga pangan serta kesejahteraan petani. Bantuan Pangan yang diberikan berupa beras merupakan salah satu instrumen bantalan sosial sekaligus diharapkan menjadi bagian stimulus pertumbuhan ekonomi.

Dalam dokumen Asta Cita Nomor 2 mengamanatkan agar memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan merupakan bagian dari inisiatif untuk mendukung tema pembangunan RKP 2026 yaitu “Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif” yang diwujudkan melalui peningkatan ketersediaan pangan untuk mendukung stabilisasi pasokan dan harga di tingkat konsumen, pengendalian inflasi pangan bergejolak dan mendorong peningkatan pertumbuhan PDB dari Sektor Pertanian.

Kegiatan akan difokuskan pada koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait faktor pendorong terjadinya kenaikan harga pangan seperti gangguan pasokan, ketidakefisienan distribusi dan hambatan akses pasar, serta kurangnya sinergi antar pemangku kepentingan.

Kegiatan penanganan isu strategis dikategorikan selesai apabila: (1) telah ditindaklanjuti oleh Pihak terkait; atau (2) hasil penyelesaian telah dikonfirmasi oleh Kedeputian, sebagaimana ditetapkan pada tabel berikut:

Kegiatan	Kriteria Penyelesaian Isu	Dokumen Pendukung	Jumlah Kegiatan/ Dokumen Pendukung
Monitoring dan Pelaporan Masa Panen Raya	Kementerian teknis menyampaikan data produksi padi dan jagung	Surat penyampaian data produksi padi dan jagung dari Kementan	1 Kegiatan/ 1 Dokumen
Rakor Inpres Pengadaan Cadangan Beras Pemerintah	Inpres Pengadaan Cadangan Beras Pemerintah telah ditetapkan	Inpres Pengadaan Cadangan Beras Pemerintah	1 Kegiatan/ 1 Dokumen
Rakor Inpres Pengadaan Cadangan Jagung Pemerintah	Inpres Pengadaan Cadangan Jagung Pemerintah telah ditetapkan	Inpres Pengadaan Cadangan Jagung Pemerintah	1 Kegiatan/ 1 Dokumen
Rakor Penyusunan RPP Penyertaan Modal Negara	Laporan rakor telah dikonfirmasi oleh Deputi	ND Laporan Rakor dan Disposisi Deputi	1 Kegiatan/ 2 Dokumen
Rapat Koordinasi Stimulus Pertumbuhan Ekonomi sektor pangan	Laporan rakor telah dikonfirmasi oleh Deputi	ND Laporan Rakor dan Disposisi Deputi	1 Kegiatan/ 2 Dokumen
Rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan Bantuan Pangan sebagai stimulus pertumbuhan ekonomi	Laporan rakor telah dikonfirmasi oleh Deputi	ND Laporan Rakor dan Disposisi Deputi	1 Kegiatan/ 2 Dokumen

Rapat Koordinasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan menjelang HBKN Natal dan Tahun Baru	Laporan rakor telah dikonfirmasi oleh Deputi	ND Laporan Rakor dan Disposisi Deputi	1 Kegiatan/ 2 Dokumen
Total Kegiatan yang ditetapkan			7 Kegiatan/11 Dokumen

Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase penyelesaian isu strategis adalah sebagai berikut:

$$\text{Persentase penyelesaian isu} = \frac{\text{Total Kegiatan yang diselesaikan}}{\text{Total Kegiatan yang ditetapkan}} \times 100$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2025 sebesar 100%, dengan target Triwulan IV sebesar 100% yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Tahun 2025. Target 100% ditetapkan sebagai komitmen Unit Kerja untuk dapat menjalankan penugasan lain yang diberikan oleh pimpinan disamping tugas terkait tlayanan internal. Dengan tugas dalam bentuk koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait faktor pendorong terjadinya kenaikan harga pangan seperti gangguan pasokan, ketidakefisienan distribusi dan hambatan akses pasar, serta kurangnya sinergi antar pemangku kepentingan, Unit Kerja menilai bahwa target yang ditetapkan dapat sepenuhnya terpenuhi.

Hingga Triwulan IV Tahun 2025, realisasi Presentasi Penyelesaian Isu Strategis yang diberikan oleh Deputi sebesar 100% dari target tahun 2025, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Triwulan IV	Realisasi Triwulan IV	%Kinerja
IKU-1.5 Persentase Penyelesaian Isu Strategis yang Diberikan oleh Deputi	%	100	100	100

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelesaian isu strategis Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan sampai dengan Triwulan IV-2025 sebanyak 7 (tujuh) kegiatan dengan output 11 (sebelas) dokumen yaitu:

No	Indikator	Bukti Dukung	Jumlah Bukti Dukung
1	Monitoring dan Pelaporan Masa Panen Raya	Surat penyampaian data produksi padi dan jagung dari Kementan	1 Kegiatan/ 1 Dokumen
2	Rakor Inpres Pengadaan Cadangan Beras Pemerintah	Inpres Pengadaan Cadangan Beras Pemerintah	1 Kegiatan/ 1 Dokumen
3	Rakor Inpres Pengadaan	Inpres Pengadaan Cadangan Jagung Pemerintah	1 Kegiatan/ 1 Dokumen

	Cadangan Jagung Pemerintah		
4	Rakor Penyusunan RPP Penyertaan Modal Negara	Laporan Rakor telah terkonfirmasi oleh Deputi	1 Kegiatan/ 2 Dokumen
5	Rapat Koordinasi Stimulus Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pangan	ND Laporan Rakor dan Disposisi Deputi	1 Kegiatan/ 2 Dokumen
6	Rapat Koordinasi Stimulus Pertumbuhan Ekonomi sektor pangan	ND Laporan Rakor dan Disposisi Deputi	1 Kegiatan/ 2 Dokumen
7	Rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan Bantuan Pangan sebagai stimulus pertumbuhan ekonom	ND Laporan Rakor dan Disposisi Deputi	1 Kegiatan/ 2 Dokumen
8	Rapat Koordinasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan menjelang HBKN Natal dan Tahun Baru	ND Laporan Rakor dan Disposisi Deputi	1 Kegiatan/ 2 Dokumen
Total			7 Kegiatan/ 11 Dokumen

Sehingga realisasi Triwulan IV Tahun 2025 sebesar 100% dari target kegiatan tahun 2025 sebanyak 7 (tujuh) kegiatan.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW IV, Capaian Kegiatan dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 sebagai berikut:

1.5. Presentase Penyelesaian Isu Strategis yang Diberikan oleh Deputi			
No	Rencana Aksi	Status	Keterangan
Triwulan I			
1	Monitoring Masa Panen Raya	Terlaksana	Telah dilaksanakan koordinasi bersama Kementerian Pertanian terkait data proyeksi panen padi
2	Rakor Inpres Pengadaan Cadangan Beras Pemerintah	Terlaksana	Telah dilaksanakan Rakor pembahasan Instruksi Presiden tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah pada tanggal 19 Februari 2025
Triwulan II			

1	Rakor Inpres Pengadaan Cadangan Jagung Pemerintah	Terlaksana	Telah terlaksana Rakor Inpres Pengadaan Cadangan Jagung Pemerintah pada tanggal 25 April 2025
2	Rakor Penyusunan RPP Penyertaan Modal Negara	Terlaksana	Telah terlaksana Rakor Penyusunan RPP Penyertaan Modal Negara pada tanggal 17 April 2025
3	Rapat Koordinasi Stimulus Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pangan	Terlaksana	Telah terlaksana Rapat Koordinasi Stimulus Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pangan pada tanggal 12 Juni 2025
Triwulan III			
1	Rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan Bantuan Pangan sebagai stimulus pertumbuhan ekonomi	Terlaksana	Telah terlaksana FGD Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Pangan dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Sosial Ekonomi tanggal 1 Oktober 2025.
Triwulan IV			
1	Rapat Koordinasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan menjelang HBKN Natal dan Tahun Baru	Tidak Terlaksana dengan Perubahan	Kegiatan tidak terlaksana karena melaksanakan penugasan prioritas dari pimpinan yaitu Rapat Koordinasi tanggal 10 Oktober 2025 terkait Tindak Lanjut Rakor Menteri 1 Oktober 2025 terkait Gabah Kering Panen yang membahas penambahan anggaran Perum BULOG untuk pembangunan infrastruktur dan penyerapan gabah saat panen gadu. Tindak lanjut ini juga merupakan upaya pemerintah dalam rangka Stabilisasi Pasokan Beras saat panen gadu dan menjelang akhir tahun 2025 serta kebutuhan HBKN 2026.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan IV Tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pemanfaatan teknologi untuk pelaksanaan rapat koordinasi melalui *video conference*, rapat koordinasi secara *hybrid* menggunakan fasilitas kantor. Jumlah efisiensi dari pengadaan rapat koordinasi melalui *video conference* tersebut diperkirakan mencapai Rp44.000.000 melalui penghematan biaya paket meeting di hotel. Hasil efisiensi tersebut dialokasikan untuk kegiatan lain mendukung capaian penyelesaian isu strategis pada triwulan selanjutnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Berikut ini beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Tidak adanya alokasi anggaran untuk Isu Strategis yang ditetapkan;
2. Belum adanya PIC untuk masing-masing kegiatan;
3. Keterbatasan kompetensi SDM dalam mengatasi Isu Strategis yang ditugaskan.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan IV Tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Pemanfaatan sumber daya yang ada secara optimal (koordinasi secara informal maupun melalui zoom meeting);
2. Penetapan PIC untuk masing-masing kegiatan;
3. Mengadakan Rapat Koordinasi atau Transfer Knowledge dari kementerian/lembaga pengampu.

1.6. Persentase Pembangunan Zona Integritas Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN

Latar Belakang

Zona Integritas yang selanjutnya disingkat ZI adalah instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Unit kerja melakukan pembangunan zona integritas yang nantinya akan dievaluasi oleh Tim Penilai Internal (TPI). Komponen penilaian pembangunan Zona Integritas terdiri dari: (Komponen dan kriteria dapat berubah mengikuti peraturan yang berlaku)

1. Nilai Komponen Pengungkit Zona Integritas dengan kriteria nilai minimal 42,75
2. Nilai Komponen Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi dengan kriteria nilai minimal 3,6
3. Nilai Komponen Hasil Sub komponen Hasil "Kinerja lebih baik" dengan kriteria nilai minimal 2,5
4. Nilai Komponen Hasil Survei Pelayanan Publik yang Prima dengan kriteria nilai minimal 3,2

Tujuan pengukuran tingkat keberhasilan pembangunan zona integritas adalah untuk mengetahui tingkat pembangunan ZI di lingkungan unit kerja untuk mewujudkan pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Adapun formula perhitungan Persentase Pembangunan Zona Integritas sebagai berikut:

$$\frac{\left(\frac{\text{Realisasi Komponen Penilaian 1}}{\text{Nilai Minimum Komponen Penilaian 1}}\right) + \dots + \left(\frac{\text{Realisasi Komponen Penilaian ke-n}}{\text{Nilai Minimum Komponen Penilaian ke-n}}\right)}{\text{Jumlah Seluruh Komponen}} \times 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2025 sebesar 70%, penetapan target tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN. Target 70% ditetapkan mengingat Kedeputusan 1 merupakan Unit Kerja dengan nomenklatur baru yang harus melalui proses pembangunan zona integritas dari awal. Target 70% dinilai sebagai angka yang

realistis dapat dipenuhi pada tahun pertama Unit Kerja baru. Secara bertahap, target Pembangunan zona integritas akan ditingkatkan pada periode berikutnya.

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pembangunan ZI oleh Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Tim Penilai Internal (TPI) yang disampaikan melalui Nota Dinas Nomor: W.06.02/11/INS.M.EKON/01/2026 tanggal 14 Januari 2026 tentang Penyampaian Nilai Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan ZI untuk mendukung Nilai IKU Sesdep, nilai evaluasi ZI Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN (D1) sebesar 78,2 atau Persentase Pembangunan ZI mencapai 105,20% dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen Penilaian	Nilai D1	Nilai Minimum	Realisasi
1	Pengungkit ZI	43,12	42,75	100,87%
2	Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi	3,67	3,60	102,05%
3	Hasil Survei Subkomponen Hasil "Kinerja Lebih Baik"	2,50	2,50	100,00%
4	Hasil Survei Pelayanan Publik yang prima	3,77	3,20	117,86%
Persentase Pembangunan ZI oleh TPI				105,20%

Sehingga capaian kinerja IKU Persentase Pembangunan Zona Integritas Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN mencapai 120%, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Triwulan IV	Realisasi Triwulan IV	%Kinerja
IKU-1.6 Persentase Pembangunan Zona Integritas Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN	%	70	105,20	120

Pelaksanaan Rencana Aksi TW IV, Capaian Kegiatan dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 sebagai berikut:

1.6. Persentase Pembangunan Zona Integritas Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN			
No	Rencana Aksi	Status	Keterangan
Triwulan I			
1	Penandatanganan Pakta Integritas	Terlaksana	Telah ditetapkan pada Januari 2025.

2	Pembentukan Tim Zona Integritas	Terlaksana	Telah ditetapkan pada Januari 2025.
3	Penyusunan Renaksi Zona Integritas	Terlaksana	Telah ditetapkan pada Januari 2025.
Triwulan II			
1	Rapat Pembahasan Zona Integritas bersama Inspektur	Terlaksana	Telah dilaksanakan Rapat Pembangunan Zona Integritas bersama Inspektur pada tanggal 23 Mei 2025
2	Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas	Terlaksana	Telah dilaksanakan pada Triwulan III 2025
Triwulan III			
1	Diskusi Pembangunan Zona Integritas bersama KemenPAN RB	Tertunda dan Digeser	Akan dilaksanakan pada Triwulan IV 2025
Triwulan IV			
1	Diskusi Pembangunan Zona Integritas bersama instansi yang memiliki Zona Integritas terbaik	terlaksana	Dilakukan diskusi kelompok terfokus dan benchmarking pembangunan Zona Integritas bersama Inspektorat Pemda Kab Garut
2	Koordinasi Pelaksanaan dan Pelaporan Survei Persepsi Anti Korupsi dan Pelayanan Publik yang Prima	terlaksana	Dilakukan pengisian form secara mandiri pengisian LKE ZI dan telah dilakukan. Dilakukan survei SPI KPK Dilakukan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dalam rangka pembangunan ZI berdasarkan ND Nomor PW.06.02/169/D.I.M.EKON.1/12/2025 tanggal 16 Desember 2025

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja yaitu penetapan PIC pembangunan Zona Integritas.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan IV Tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pemanfaatan teknologi untuk pelaksanaan rapat koordinasi melalui *video conference*, rapat koordinasi secara *hybrid* menggunakan fasilitas kantor. Jumlah efisiensi dari pengadaan rapat koordinasi melalui *video conference* tersebut diperkirakan mencapai Rp51.000.000 melalui penghematan biaya paket meeting di hotel. Hasil

efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan lain mendukung capaian pada triwulan selanjutnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Berikut ini beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Pemahaman konsep dan teknis Zona Integritas masih beragam sehingga berpengaruh pada belum optimalnya komponen pengungkit dan hasil dalam pembangunan Zona Integritas;
2. Pembangunan Zona Integritas belum menjadi prioritas dalam agenda pimpinan;
3. Mekanisme pengumpulan dan penyimpanan bukti dukung pembangunan Zona Integritas belum memadai.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan IV Tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai.

1. Melakukan sosialisasi melalui publikasi terkait nilai-nilai pembangunan Zona Integritas Seperti Manajemen Risiko dan Anti Korupsi;
2. Mendorong keterlibatan pimpinan sebagai *role model* dalam pembangunan Zona Integritas;
3. Penunjukan PIC dan pemanfaatan *cloud service* dalam penyimpanan dokumen.

1.7. Indeks Kepuasan Layanan Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN

Latar Belakang

Layanan Sekretaris Deputy adalah layanan yang diberikan oleh Sekretaris Deputy kepada Kedeputian untuk melaksanakan tugas koordinasi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kegiatan, tata kelola, dan dukungan administrasi di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN.

Sekretariat Deputy menyelenggarakan fungsi koordinasi dan pemberian dukungan dalam :

1. Perencanaan, program dan anggaran;
2. Pengelolaan kinerja dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
3. Pengelolaan sistem pengendalian internal;
4. Pengelolaan data dan sistem informasi;
5. Pengelolaan penataan organisasi, tata laksana, dan SDM;
6. Pengelolaan BMN;
7. Penataan kearsipan dan persuratan;
8. Pengelolaan hubungan masyarakat, keprotokolan, persidangan, dan penyiapan naskah pimpinan, dan administrasi;
9. Pemantauan, analisis dan evaluasi pengelolaan keuangan;
10. Pemantauan, evaluasi, dan laporan program kegiatan dan tata kelola; dan
11. Pelaksanaan fungsi lainnya

Tujuan dari IKU ini adalah untuk memberikan gambaran yang komprehensif terkait kinerja Sekretaris Deputy dalam penyelenggaraan layanan Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN. Adapun periode pelaporan Indeks dilaksanakan setiap Semester (Semester I dan II Tahun 2025).

Indikator Kinerja Utama Indeks kepuasan layanan Sekretariat Deputy diukur melalui Survei Kepuasan Layanan Internal di Lingkungan Deputy Bidang Koordinasi

Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Daftar pertanyaan survei terdiri dari beberapa pertanyaan berupa 5 (lima) jenis aspek layanan yang telah diberikan oleh Sekretaris Deputi kepada Deputi. Jumlah responden dipilih secara acak/random dan berasal dari unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN. Adapun formulasi perhitungan indeks kepuasan layanan sebagai berikut:

$$\text{Rumus Perhitungan : } \frac{\Sigma \text{Rerata jawaban dari masing-masing item survey}}{\text{Jumlah Item Survey}}$$

Nilai Indeks diperoleh berdasarkan nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh responden, dengan 4 (empat) kategori penilaian yaitu:

- A. Sangat Puas (4), rentang nilai 3.51 s.d 4
- B. Puas (3), rentang nilai 3.01 s.d 3.50
- C. Tidak Puas (2), rentang nilai 2.51 s.d 3.00
- D. Sangat Tidak Puas (1), rentang nilai <2.50

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2025 sebesar 3 dari 4, penetapan target tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Tahun 2025. Target 3 dari 4 menggambarkan komitmen Unit Kerja untuk dapat memberikan pelayanan dengan target minimal “memuaskan”. Dalam pelaksanaannya, proses pemberian layanan memiliki dinamika tersendiri yang terkadang sulit untuk memenuhi ekspektasi seluruh individu. Namun demikian, unit kerja tetap berupaya memberikan pelayanan standar dengan kategori memuaskan dan tetap memberikan ruang perbaikan ke depan.

Hingga Triwulan IV Tahun 2025, telah dilaksanakan dua kali survei kepuasan layanan Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN untuk periode Semester I dan Semester II tahun 2025 dengan realisasi Indeks Kepuasan masing-masing sebesar 3,49 dan 3,57, sehingga secara total Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN mencapai 3,53 atau dalam kategori Sangat Puas (4), dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Triwulan IV	Realisasi Triwulan IV	%Kinerja
IKU-1.7 Indeks Kepuasan Layanan Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN	Indeks	3 dari 4	4	120

Dalam rangka perbaikan secara berkesinambungan kualitas layanan tugas dan fungsi Sekretariat Deputi kepada internal pegawai di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN (Deputi I), Sekretariat Deputi telah melaksanakan survei kepuasan layanan periode Semester I Tahun 2025 pada tanggal 25 Juni s.d. 10 Juli 2025 [Nota Dinas Nomor: OT.05.03/74/D.I.M.EKON.1/06/2025 tanggal 25 Juni 2025]. Survei dilakukan

dengan pendekatan riset kuantitatif menggunakan instrumen kuesioner yang didistribusikan seluruh pegawai unit Deputi I. Jumlah pegawai (ASN dan PPNPN) yang mengisi kuesioner secara lengkap sebanyak 82 pegawai dari calon responden sebanyak 83 pegawai (tingkat respon 99%).

Sementara pada Semester II Tahun 2025, survei kepuasan layanan dilaksanakan pada tanggal 18 Desember s.d. 31 Desember 2025 [Nota Dinas Nomor: OT.05.03/171/D.I.M.EKON.1/12/2025 tanggal 18 Desember 2025]. Jumlah pegawai yang telah mengisi kuesioner survei Semester II secara lengkap sebanyak 48 pegawai dari calon responden sebanyak 83 pegawai (tingkat respon 57,8%).

Pengukuran kepuasan layanan menggunakan 5 (lima) aspek yaitu *Responsiveness*, *Reliability*, *Tangible*, *Assurance*, dan *Empathy*, dengan hasil sebagai berikut:

1. Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Deputi I Semester I-2025 sebesar 3,49, berada pada kategori “memuaskan (3)” atau dapat dinyatakan pegawai di lingkungan kerja Deputi I merasa puas dengan kinerja layanan Sekretariat Deputi pada Semester I-2025. Pada Semester II-2025 Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Deputi I sebesar 3,57 berada pada kategori “sangat puas (4)”, hal ini menunjukkan adanya perbaikan kinerja pada semester II setelah dilakukan tindak lanjut terhadap saran dan masukan berdasarkan hasil survei Semester I-2025.
2. Pada Semester I, aspek kepuasan yang memiliki skor dibawah tingkat kepuasan layanan total sehingga menjadi prioritas perbaikan adalah Aspek *Tangible* yaitu terkait ketersediaan sarana dan prasarana dalam melakukan pelayanan dengan nilai 3,40. Skor aspek tangible mengalami kenaikan pada Semester II menjadi 3,62. Sementara aspek yang menjadi prioritas perbaikan pada periode Semester II adalah Aspek *Empathy* yaitu Pemahaman pegawai terhadap permasalahan unit kerja serta ketepatan solusi yang diberikan.

Atas upaya perbaikan berdasarkan saran dan masukan pada survei Semester I-2025, Sekretariat Deputi I berhasil meningkatkan indeks kepuasan layanan pada semester II-2025, sehingga target Indeks Kepuasan Layanan Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan BUMN hingga akhir Tahun 2025 dapat tercapai dengan catatan perlu meningkatkan tingkat respon pada periode selanjutnya.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW IV, Capaian Kegiatan dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 sebagai berikut:

1.7 Indeks Kepuasan Layanan Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN			
No	Rencana Aksi	Status	Keterangan
Triwulan I			
1	Persiapan Survei Kepuasan Layanan Sekretaris Deputi Semester I	Terlaksana	Telah dilaksanakan persiapan pelaksanaan survei meliputi penyusunan kuesioner, target responden dan konsep Nota Dinas

			permohonan pengisian survei.
Triwulan II			
1	Pelaksanaan dan Pelaporan Survei Kepuasan Layanan Sekretaris Deputi Semester I	Terlaksana	Telah dilaksanakan Survei Kepuasan Layanan Sekretaris Deputi Semester I 2025 tanggal 25 Juni 2025 – 10 Juli 2025 ND Nomor: OT.05.03/74/D.I.M.EKON.1/ 06/2025
Triwulan III			
1	Tindak Lanjut Hasil Survei Semester I dan Persiapan Survei Kepuasan Layanan Sekretaris Deputi Semester II	Terlaksana	Tindak lanjut upaya perbaikan dari hasil survei Semester I dan persiapan Survei Kepuasan Semester II telah dilaksanakan bersamaan dengan pembahasan Capaian Kinerja TW III pada Dialog Kinerja tanggal 6 Oktober 2025.
Triwulan IV			
1	Pelaksanaan dan Pelaporan Survei Kepuasan Layanan Sekretaris Deputi Semester II	Terlaksana	Telah dilaksanakan Survei Kepuasan Layanan Sekretaris Deputi Semester II 2025 tanggal 18 - 31 Desember 2025 ND Nomor: OT.05.03/171/D.I.M.EKON.1/12/2025

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan IV Tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pemanfaatan *google form* sebagai instrumen kuesioner survei. Jumlah efisiensi diperkirakan mencapai Rp4.000.000 melalui pemanfaatan aplikasi kuesioner *google form*.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, terdapat kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut yaitu pemahaman maupun kesadaran pegawai terhadap pentingnya survei dalam peningkatan kualitas layanan masih beragam, sehingga kurang mendapatkan perhatian dalam mengisi atau memberikan umpan balik yang konstruktif.

Berdasarkan kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan IV Tahun 2025, maka upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai yaitu internalisasi pentingnya survei kepuasan untuk perbaikan layanan maupun perbaikan kinerja.

Jakarta, 14 Januari 2026

Sekretaris Deputi

Muhammad Saifulloh